

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Supryadi No. 5 Nganjuk Telp. / Fax. (0358) 328079
e-mail : kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarkatuh

Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus ditingkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintahan daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik, FKUB, FKDD, FKDM, FPK, MUI, pemangku kebijakan, dukungan instansi lain dan tokoh masyarakat dalam rangka turut menjaga Persatuan dan Kesatuan Kabupaten Nganjuk.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan dan bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat, Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho.

Nganjuk, 15 Januari 2024

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan kepemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. sebagai bahan acuan bagi pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Kerjasama Program di Bidang Kementerian Dalam Negeri ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelengaraan Pendidikan Politik ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171) ;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

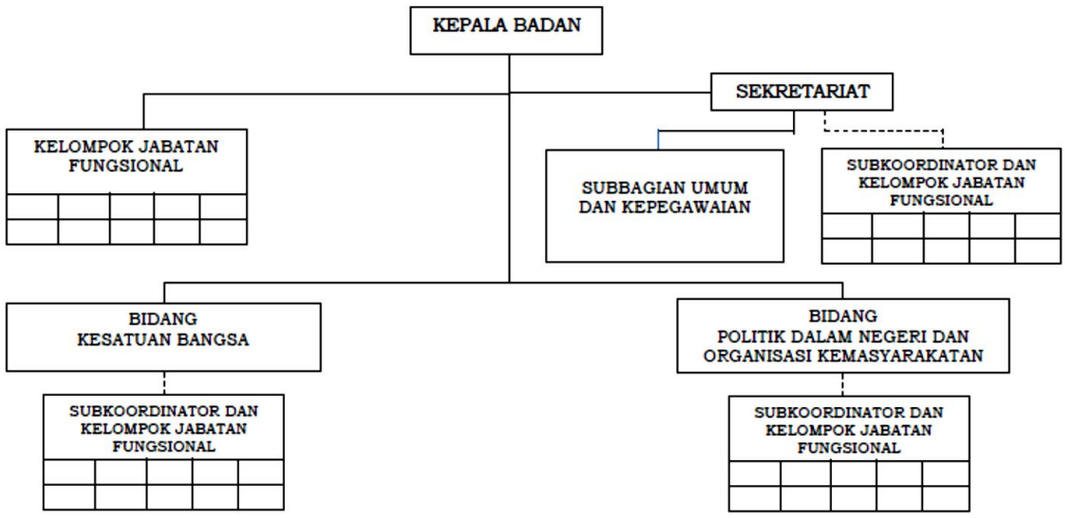
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengeloaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 ;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.4.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022)



1.4.2. TUGAS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4.3. FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Jumlah Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk pada akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	9	4	13
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	7	3	10
	Total	16	7	23

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS sebanyak 13 orang dan tenaga kontrak /THL sebanyak 10 orang

Tabel 1.2

Data Pejabat berdasarkan Eselon

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Badan	II b	1
Sekretaris	III a	1
Kepala Bidang	III b	2
Kasubag	IV a	1
Fungsional	IV a	4

Tabel 1.3

Susunan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pangkat / Gol	S2	S1	SLTA	SLTP	SD
Pembina Utama Muda / IV/c	-	1	-	-	-
Pembina Tk. I / IV/b	1	-	-	-	-
Pembina / IV a	1	-	-	-	-
Penata Tk I / III d	-	6	-	-	-
Penata / III c	-	-	-	-	-
Penata Muda Tk I / III b	-	1	-	-	-
Penata Muda / III a	-	-	2	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-	-	-	-
Pengatur / II c	-	-	1	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-	-	-	-
Pengatur Muda / II a	-	-	-	-	-
Juru Tk I / I d	-	-	-	-	-
Juru / I c	-	-	-	-	-
Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	8	3	-	-

1.6. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis,

maka yang menjadi isu utama dalam organisasi dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD dan kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas yaitu:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar suksesnya pembangunan Nasional
2. Rendahnya semangat Nasionalisme yang masih menghinggapi masyarkat serta pemahaman, pengamalan dan penghayatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Meningkatknya pengaruh era pasar bebas yang masuk dalam warga masyarakat terutama masalah Ideologi bangsa yang harus diwaspadai dengan melibatkan peran aktif segenap elemen baik Instansi Pemerintah, masyarakat dan Ormas/LSM untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri
4. Kondisi stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya tali persatuan dan kesatuan bangsa utamanya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024
5. Keterlibatan dan peran aktif jajaran Forkopimda, Ormas, Partai Politik, Tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan situasi dan stabilitas daerah yang kondusif

1.7. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun ini menjelaskan pencapaian selama Tahun 2023. Pencapaian kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik sebagai berikut :

- Bab I (*Pendahuluan*), menjelaskan secara ringkas kondisi umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- Bab II (*Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*), menjelaskan tentang Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.
- Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*), menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV (*Penutup*), berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Secara Umum Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

2.1. Rencana Strategis (Sumber dari Renstra SKPD)

2.1.1. VISI DAN MISI

VISI

Visi merupakan Kondisi Ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Visi harus memiliki pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Nganjuk akan dibawa. Visi berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Visi menjadi arah dan tujuan dalam mengelola berbagai potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang dibangun secara terpadu, sinergis dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 adalah :

"**TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT**"

Pernyataan visi tersebut dicapai dengan mengerahkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Nganjuk dengan motto Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho. Motto ini dibangun untuk menyatukan gerak langkah dan semangat bersama pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah dari pinggiran atau perdesaan yang merupakan basis sumber daya Kabupaten Nganjuk. Sinergi gerak ini akan mampu menjadikan kekuatan besar yang harmonis antara pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga mampu mewujudkan daerah yang Maju dan Bermartabat, terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang hakiki, merata dan berkelanjutan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- **Terwujudnya,** terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat yang dilandasi semangat bersama untuk membangun dan mengembangkan potensi lokal dalam mempercepat pembangunan daerah.
- **Maju,** suatu keadaan/kondisi masyarakat yang memiliki sikap, cara berpikir dan bertindak dengan daya saing tinggi untuk menggali, melaksanakan dan

mengembangkan pembangunan daerah, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.

- **Martabat** bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk merupakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia dan etika yang luhur sebagai landasan etos kerja dalam membangun daerah. Hasil pembangunan Nganjuk akan memberi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Memperkuat kinerja birokrasi, bersih, professional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasarkan atas Misi Kabupaten Nganjuk diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan **Misi 1** : "*Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat*

memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban" yang **bertujuan** meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang harmonis, toleran dan aman berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa **sasaran** yang akan dicapai meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius.

Adapun **strategi** untuk mewujudkan misi 1 diatas, antara lain dengan meningkatkan koordinasi penangangan konflik sosial dan koordinasi kewaspadaan dini daerah dengan **arah kebijakan** meningkatkan peran serta elemen masyarakat menuju terciptanya kondisi daerah yang nyaman dan kondusif, mengembangkan kehidupan keagamaan yang rukun dan toleran diantara umat beragama, memantapkan 4 pilar kebangsaan melalui upaya mengembangkan nilai-nilai berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi warga masyarakat, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan.

2.2. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan/instasi yang lebih tinggi kepada pimpinan instasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja terwujudlah suatu komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta Sumber Daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Suatu Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di tandatangani oleh Bupati dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 seperti Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	%	90

Tabel 2.2

Program Tahun Anggaran 2023

No	Program	Indikator	Target	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95 Nilai Indeks	3.200.491.900,-	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	85%	1.025554140,-	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90%	30.345.416.862,-	
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90%	1.182.600.000,-	
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90%	155.899.960,-	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	8.087.530.200,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator ini menggambarkan upaya Kabupaten Nganjuk dalam penciptaan situasi daerah yang nyaman dan kondusif yang ditandai antara lain :

- Menurunnya konflik sosial di masyarakat ;
- Meningkatnya kesadaran elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang nyaman dan kondusif di wilayah Kabupaten Nganjuk.

3.1.1. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	90%	100%	111%

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa selama Tahun 2023 Bakesbangpol selalu mengedepankan pencegahan konflik sehingga tidak mencuat menjadi konflik di masyarakat. Ukuran keberhasilan dari indikator tersebut adalah menurunnya konflik yang ada di masyarakat. Potensi-potensi konflik yang ada berhasil diatasi sehingga tidak meluas menjadi konflik. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari Perangkat Daerah untuk mencegah terjadinya konflik melalui program dan kegiatan yang ada pada Bakesbangpol diantaranya adanya koordinasi antar pimpinan daerah atau disebut dengan forkopimda, terbentuknya Tim Terpadu penganganan konflik, Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pelaksanaan sosialisasi kewspadaan dini masyarakat, sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama, pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan, sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat. Potensi Konflik yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebanyak 6 kasus dan yang tertangani adalah sebanyak 6 kasus. Potensi konflik tersebut adalah

1. Aksi unjuk rasa oleh perwakilan Masyarakat Desa Karangsono Kec.Loceret tentang adanya aktivitas tambang galian C, yang meyebabkan kerusakan akses jalan dan suara bising di sekitar lokasi pada tanggal 22 Pebruari 2023 dan diselesaikan dengan musyawarah di balai Desa Karangsono dengan perjanjian dan kompensasi serta ganti kerugian warga terdampak.
2. Adanya polusi bau dari pakan ternak lele pengusaha di desa Babadan Kec. Patianrowo pada dan diselesaikan dengan musyawarah pada tanggal 28 Pebruari 2023 di balai Desa Babadaan Kec.Patianrowo dengan perjanjian dan Akan diadakan pendampingan dari Dinas KPP Kab.Nganjuk untuk masalah tersebut.
3. Perselisihan antara PT. Gunawan Fajar dengan anggota SBTP-FSBI tentang adanya penyesuain kenaikan UMK Kab.Nganjuk tahun 2023 dan diselesaiakan dengan Musyarawarah Bipartite antara pihak Management PT.Gunawan Fajar dan perwakilan anggota SBTP-FSBI

dengan perjanjian antara kedua belah pihak dimana Perusahaan akan menyesuaikan dengan tuntutan tersebut.

4. Aksi unjuk rasa perwakilan Masyarakat Desa Jaan Kec.Gondang di Pendopo Kab.Nganjuk, tantang adanya polusi bau yang menyengat dari pengolahan limbah bulu Ayam di lokasi PT.Maharani hingga menyebabkan bau di sekitar lingkungan Desa Jaan pada tanggal 14 Maret 2023 dan telah ditangani dengan Musayawarah di Ruang Rapat SETDA Kab.Nganjuk yang dimana pihak Pemerintah daerah akan membantu dengan mengadakan uji laboratoriun tentang bau limbah tersebut dan menghentikan sementara aktivitas produksi PT Mharani.
5. Aksi unjuk rasa perwakilan Masyarakat Desa Jaan Kec.Gondang tantang adanya polusi bau yang menyengat dari pengolahan limbah bulu Ayam di lokasi PT.Maharani hingga menyebabkan bau di sekitar lingkungan Desa Jaan.
6. Adanya mis komunikasi antara warga Desa Jaan dengan PT.Mulia Makmur yang menyebabkan simpang siur di berita terkait prioritas rekrutmen pegawai dan telah diselesaikan dengan musyawarah dimana PT.Mulia Makmur akan menepati janji mengutamakan calon pekerja dari penduduk Desa Sekitar.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terahkir

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Nganjuk menetapkan 1 target sasaran OPD dengan didukung 6 Prgram. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sasaran Organisasi dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Realisasi		
					2021	2022	2023
Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	85%	85%	90%	75%	91%	100%

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Dalam hal ini diprioritaskan upaya pencegahan konflik melalui program dan kegiatan yang ada pada Bakesbangpol.

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut maka kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami peningkatan, hal ini merupakan kerja keras untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari tahun ke tahun selalu berupaya menangani konflik sosial melalui upaya pencegahan.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir pada Dokumen Renstra.

Tabel 3.4.1

Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	65%	70%	85%	85%	90%

Tabel 3.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2023	Capaian Tahun 2023	Tingkat kemajuan
1.	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	90%	100%	111%

Dari tahun awal renstra, target yang ditetapkan mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa bakesbangpol harus bisa meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun. Metode penghitungan ini diukur

meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun. Metode penghitungan ini diukur selama satu tahun. Satuan dari perhitungan ini adalah persentase sehingga target renstra tidak dijumlah mulai dari awal sampai akhir renstra. Pada Tahun 2023 target kinerja mencapai 100% karena berhasil mencegah terjadinya konflik melalui upaya pencegahan dan meredam potensi-potensi yang akan menimbulkan konflik. Sedangkan tingkat kemajuan yang diukur dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target pada akhir renstra dikali 100 persen adalah 111%

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Provinsi/Kab/Kota berbatasan.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Standard Nasional/ Provinsi/ Kab/Kota Daerah lain*)	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1.	Bakesbangpol Kab. Nganjuk	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama		100%
2.	Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur	Meningkatnya antisipasi dan respons terhadap konflik sosial di masyarakat Jawa Timur	Persentase kejadian poleksosbud di Jawa Timur yang ditindaklanjuti	100%	
3.	Kantor kesbangpol Kota Kediri	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Konflik di Masyarakat	100%	

*) LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2022

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan standar nasional/ Provinsi/ Kab/Kota Daerah lain.

Beberapa alasan dipilihnya Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dan Kantor kesbangpol Kota Kediri adalah :

1. Kemudahan dan ketersediaan akses data laporan kinerja melalui website masing-masing Perangkat Daerah
2. Adanya kesamaan atau kemiripan sasaran dan indikator

Pada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, realisasi persentase kejadian poleksosbud di Jawa Timur yang ditindaklanjuti Tahun 2022 yaitu 100%. Metode perolehan data untuk proses penghitungan formulasi capaian indikator sasaran tersebut diperoleh dari jumlah kejadian poleksosbud yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh kejadian poleksosbud di Jawa Timur.

Pada Kantor Kesbangpol Kota Kediri realisasi capaian kinerja adalah 100% dikarenakan sesuai atau dibawah estimasi kejadian yang seharusnya ditargetkan. Bila melebihi target maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berhasil dalam menjaga kondisi keamanan Kota Kediri yang Kondusif. Semua potensi Konflik dapat dicegah dan diredam saat mulai muncul sehingga tidak menjadikan konflik yang berarti di tingkat Kota. Cara penghitungan ini agak berbeda dengan instansi lain yang ingin meningkatkan hasil capaian angka untuk pengukuran kinerja.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi yang akan dilakukan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tercapai/tidak tercapai	Ket

1.	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	90%	100%	111%	Tercapai	

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisa keberhasilan target di antaranya:

a) Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.
b) Sinergitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, seperti FKUB, FKDM, FPK, Timdu Penanganan konflik sosial, Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan FORKOPIMDA.
c) Dukungan seluruh masyarakat secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Nganjuk
d) Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

TABEL 11
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian kinerja Tahun 2023	Realisasi Anggaran	Tingkat efisiensi	Ket
1.	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	111%	98,30%	13%	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka tingkat efisiensi sumber daya adalah 13%. Tingkat efisiensi ini diperoleh dengan mengurangi capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Tabel
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1.	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	94%
			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	96%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	100%
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	107%
			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	91,2%
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	111%

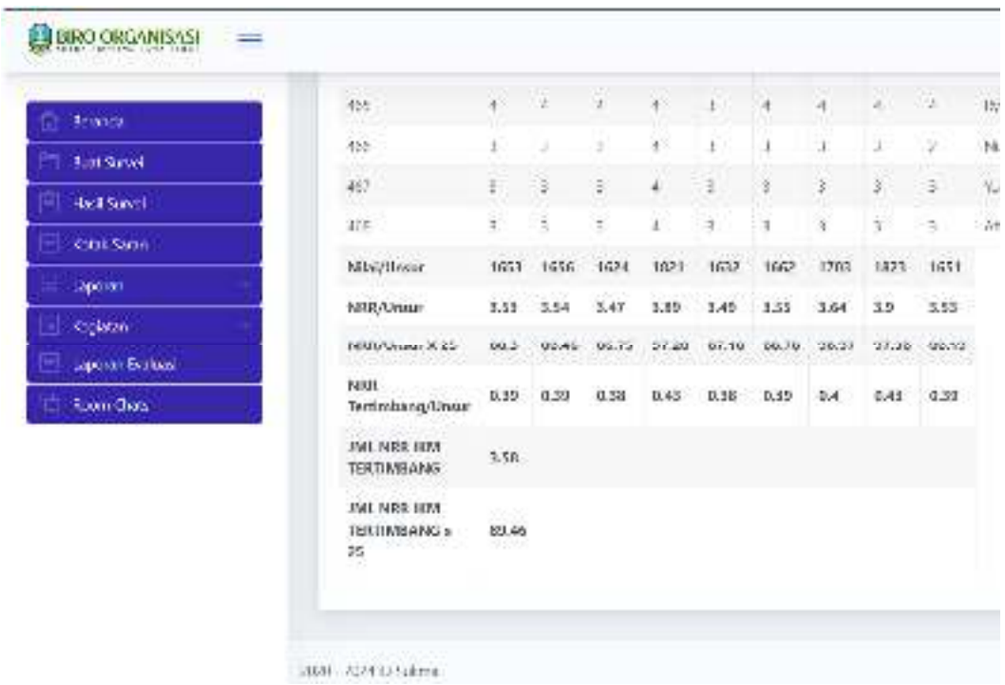
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai poltik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	100%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	102%
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev	92%
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	100%
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90%
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	111%
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	111%

Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik berupaya mewujudkan suasana yang harmonis dalam kehidupan masyarakat dan umat beragama. Upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera dilakukan dengan meminimalisir benturan antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial. Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran.

Penjelasan capaian Kinerja Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Program ini adalah Indeks Kepuasan masyarakat, dimana nilai Indeks selama Tahun 2023 adalah sebesar 89,46 Nilai Indeks.



Sedangkan Indikator dari Kegiatan terdiri dari :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun dengan target 24 dokumen dan telah tercapai 24 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Dokumen tersebut adalah LKPJ, Laporan evaluasi Renstra, LkjIP, LPPD, RKA 2023, RKPA TA 2023, DPA TA 2023, DPPA TA 2023, Laporan Tribulan 1 s/d 4, Evaluasi kinerja Tribulan 1 s/d 4, Laporan kinerja Tribulan 1 s/d 4, Renja 2024, Perubahan Renja 2023, Ranwal Renja TA 2025.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan target 39 dokumen dan telah tercapai 41 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 103%.

Dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan gaji sebanyak 14 dokumen, TPP sebanyak 14 dokumen, laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen, dan laporan realisasi anggaran dan SPJ Fungsional sebanyak 12 laporan.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan dengan target 2 dokumen dan telah tercapai 2 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Dokumen tersebut adalah dokumen pengadaan pakaian dinas dan pelaksanaan bimbingan teknis.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan dengan target 4 dokumen dan telah tercapai 4 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Jenis dokumen tersebut adalah dokumen pengadaan bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, maupun perjalanan dinas.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan dengan target 1 dokumen dan telah tercapai 1 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Jenis dokumen tersebut adalah dokumen pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2023.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan dengan target 3 dokumen dan telah tercapai 3 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Jenis dokumen tersebut adalah dokumen pertanggungjawawan jasa surat-menyurat, listrik, telpon, internet dan penyediaan bahan komputer maupun perabot kantor.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan dengan target 3 Jenis dan telah tercapai 3 Jenis sehingga capaian kinerja adalah 100%. Jenis dokumen tersebut adalah pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin serta bangunan edung kantor.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

   Indikator dari program ini adalah Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev dengan target 90% sedangkan realisasinya adalah 88% sehingga capaian kinerja adalah 97%. Dari Persentase tersebut didapat dari jumlah target sebanyak 2.706 orang namun realisasinya adalah 2.393 orang.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

   Implementasi dari Program ini dijabarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Jumlah anggaran pada Kegiatan ini Rp30.345.416.862 dan terealiasi sebesar Rp30.321.664.544 dengan sisa anggaran Rp23.752.31 sehingga realiasi anggaran sebesar 99,92%.

   Kegiatan tersebut dijabarkan lagi ke dalam Sub Kegiatan sebagai berikut :

   3.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Adapun output kegiatan ini adalah Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang dilaksanakan di beberapa kecamatan, dengan peserta masing-masing lokasi kegiatan sebanyak 100 orang yang dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan yakni Jatikalen dan Wilangan.

Pada kegiatan ini menghadirkan peserta dari unsur Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, PKK dan Karang Taruna. Sedangkan narasumber dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Target yang diharapkan pada sub Kegiatan ini adalah 100 orang peserta namun tingkat kehadiran peserta sebanyak 97 orang (97%).

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 120.682.218 dan dapat terserap Rp.97.449.900 sisa Rp. 23.232.31 sehingga capaian kinerja 80,75%.

3.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Output sub kegiatan. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp30.222.414.644 dan dapat terealisasi sebesar Rp30.222.414.644 artinya tercapai 100% sesuai yang ditargetkan. Adapun rincian out put sub kegiatan ini terdiri dari :

a. Pemberian Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Pada out put kegiatan ini merupakan belanja hibah uang kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk hasil Pemilu Tahun 2019.

Adapun besaran belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut :

No	Partai	Kursi	Suara	Nilai Persuara	Jumlah
1	PDIP	13	155.444	5000	777.220.000
2	PKB	9	114.032	5000	570.160.000
3	P.Hanura	6	58.941	5000	294.705.000
4	P. Gerindra	6	57.938	5000	289.690.000
5	Golkar	5	69.294	5000	346.470.000
6	P. Demokrat	3	45.171	5000	225.855.000
7	P. Nasdem	3	31.801	5000	159.005.000
8	PKS	2	29.718	5000	148.590.000
9	PPP	2	18.137	5000	90.685.000
10	P.PERINDO	1	12.415	5000	62.075.000
	Junlah				2.964.455.000

Jumlah belanja hibah uang kepada Partai Politik sebesar Rp.2.964.455.000,-. Target yang diharapkan pada sub kegiatan ini dapat tercapai sebesar 100%.

b. Hibah Pilkada 2024

Jumlah belanja hibah untuk Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024 sebesar Rp27.257.959.644,- yang dihibahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk sebesar Rp20.814.488.444,- dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebesar Rp6.443.471.200,-. Dana hibah ini dianggarkan pada PAK Tahun 2023 dan berhasil dicairkan sebesar Rp27.257.959.644,- dan ini dari yang ditargetkan 100% dapat tercapai.

3.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Out put sub kegiatan ini berupa Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sosial Politik di wilayah Kabupaten Nganjuk menjelang Pemilu dan Pemilukada 2024. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.320.000,- dan terserap 1.800.000 sisa anggaran Rp520.000,- sehingga capaian mencapai 77,59%

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Implementasi dari Program ini dijabarkan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan dianggarkan sebesar Rp1.182.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.072.475.000 (90,69%) sisa anggaran Rp 110.125.000,-.

Pada kegiatan ini dijabarkan pada sub kegiatan :

4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pe-laksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Out put Sub Kegiatan ini berupa :

- Honorarium Tim Terpadu Pengawasan Ormas Belanja yang dialokasikan sebesar Rp45.110.000 dan terserap Rp21.000.000,- sisa anggaran Rp24.110.000,-(46,55%) dari pagu anggaran. Hal ini karena pada tribulan 1 belum terlambat dalam penyerapan.
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

  Alokasi anggaran sebesar Rp1.115.000,- dan terserap Rp1.040.000.000 sisa anggaran Rp75.000.000. (93,27%).

  Daftar Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyrakat yang menerima pada Hibah APBD Tahun 2023 :

No	Nama Lembaga/Ormas	Besaran Hibah (Rp)
1	PCNU Kab. Nganjuk	250.000.000,-
2	MUI Kabupaten Nganjuk	150.000.000,-
3	PD Muhammadiyyah	115.000.000,-
4	DPD LDII Kabupaten Nganjuk	100.000.000,-
5	DPD BKRMI Kab. Nganjuk	10.000.000,-
	Jumlah	625.000.000,-

Daftar Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyrakat yang menerima Hibah pada Perubahan APBD Tahun 2023.

No	Nama Lembaga/Ormas	Besaran Hibah (Rp)
1	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Nganjuk	100.000.000,-
2	GP Ansor Kab. Nganjuk	75.000.000,-
3	FKUB Kab. Nganjuk	75.000.000,-
4	Yayasan Gerontologi Abiyasa Perwakilan Kab. Nganjuk	75.000.000,-
5	PSMTI Kab. Nganjuk	50.000.000,-
6	Senkom Mitra Polri	25.000.000,-
7	Senam Tera Indonesia	15.000.000,-
	Jumlah	415.000.000

Pada dana hibah perubahan APBD Tahun 2023 tersebut dengan target ormas penerima Hibah 8 ormas namun tercapai 7 ormas (87,50%).

4.2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.900.000,0 dan terserap Rp. 0,-

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

   Indikator dari program ini adalah Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev dengan target 90% sedangkan realisasinya sebesar 90% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Target peserta sebanyak 450 orang, realisasinya adalah sebanyak 405 orang.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Indikator dari program ini adalah persentase peningkatan kewaspadaan, dengan target 90% sedangkan realisasinya adalah sebesar 88%. Data tersebut didapat dari target sebanyak 400 orang namun realisasinya adalah 350 orang.

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 9
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	TAHUN 2023		
		Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	% Realisasi
	Urusan Pemerintahan Umum			
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa	43.997.493.062	43.248.090.076	98,30%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.200.491.900	2.855.960.732	89,2%
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	40.346.000	40.103.000	99,4%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.346.000	40.103.000	99,4%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.117.432.500	1.903.892.173	89,9%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.090.490.000	1.880.885.173	90,0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.172.500	4.668.000	90,2%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.770.000	18.339.000	84,2%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.908.000	63.424.570	90,7%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.818.000	8.660.500	98,2%

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.090.000	54.764.070	89,6%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.368.210	184.185.820	89,7%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.180.080	50.969.000	84,7%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.178.130	8.553.100	84,0%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.010.000	44.993.304	34,9%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.540.440	152.810.500	98,2%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.540.440	152.810.501	98,2%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.205.500	77.258.803	70,1%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	820.000	54,7%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.200.000	57.160.803	78,1%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.505.500	19.278.000	54,3%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	501.691.250	434.285.866	86,6%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.793.600	137.687.568	92,5%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.900.000	19.445.000	81,4%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	328.997.650	277.153.298	84,2%
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.025.554.140	901.554.950	87,9%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.025.554.140	901.554.950	87,9%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.022.214.140	900.054.950	88,0%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	3.340.000	1.500.000	44,9%
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	30.345.416.862	30.321.664.544	99,9%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.345.416.862	30.321.664.544	99,9%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120.682.218	97.449.900	80,7%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.222.414.644	30.222.414.644	100,0%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.320.000	1.800.000	77,6%
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.182.600.000	1.087.775.000	92,0%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.182.600.000	1.087.775.000	92,0%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.179.700.000	1.086.800.000	92,1%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.900.000	975.000	33,6%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	155.899.960	84.739.750	54,4%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	155.899.960	84.739.750	54,4%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	154.999.960	84.739.750	54,7%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900.000	-	0,0%
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.087.530.200	7.996.395.100	98,9%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.087.530.200	7.996.395.100	98,9%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377.135.200	310.787.100	82,4%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	900.000	225.000	25,0%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	7.709.495.000	7.685.383.000	99,7%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik dari internal maupun eksternal adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang capaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, sarana dan prasarana yang ada tidak dapat digunakan/rusak, SDM yang ada sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti penguatan ideologi pancasila, munculnya potensi-potensi konflik di tengah masyarakat,

B. Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah adalah dengan memperbaiki/memperbarui sarana dan prasarana, melakukan koordinasi dengan bagian organisasi maupun BKPSDM terkait Anjab, Peningkatan Kapasitas SDM baik melalui APBD maupun media online secara gratis, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam internal Bakesbangpol baik melalui rapat-rapat internal maupun maupun secara lisan dan bentuk-bentuk lainnya yang mampu meningkatkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat maupun generasi muda, meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal.

C. Upaya-upaya organisasi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa mendatang adalah melakukan evaluasi penyerapan anggaran dan kinerja, pembagian kerja yang terstruktur, menjalin keakraban, pimpinan harus menjadi panutan bagi bawahan, pengembangan kompetensi, memberikan kesempatan pengembangan karir.

Dengan keberhasilan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tidak berbangga diri. Karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin kompleks.

Nganjuk, 15 Januari 2024

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM ASHARI, S.Sos

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, M.BA

Jabatan : Plt. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 11 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, M, M.BA	IMAM ASHARI, S.Sos
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19670614 198902 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase penanganan konflik sosial dan kehidupan Beragama	90 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.697.658.848	
2	Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 150.862.460	
3	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp.5.440.711.278	
4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Masyarakat	Rp. 713.217.800	
5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Rp. 55.899.960	
6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp.7.912.330.200	

Nganjuk, 11 Januari 2023

Plt. Bupati Nganjuk

Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, M, M.BA

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Nganjuk

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp (0358) 3516135 e-mail : kesbangpolkab.nganjuk@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 28 /K/411.405/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undanh Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten NganjukTahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 28 Maret 2022

an. BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670508 198903 1 002

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/28 /K/411.405/2022
Tanggal : 28 Maret 2022

1. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Fungsi :
   a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
   b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja			
1	2	3	4	5
Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius	Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	Konflik sosial yg tertangani / Konflik sosial yg terjadi x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 28 Maret 2022
an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670508 198903 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**16.823.069.426**	**147.611.120**	**0**	**0**	**16.970.680.546**	**43.840.752.622**	**156.740.440**	**0**	**0**	**43.997.493.062**	**27.026.812.516**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.550.047.728**	**147.611.120**	**0**	**0**	**2.697.658.848**	**3.043.751.460**	**156.740.440**	**0**	**0**	**3.200.491.900**	**502.833.052**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**32.220.000**	**0**	**0**	**0**	**32.220.000**	**40.346.000**	**0**	**0**	**0**	**40.346.000**	**8.126.000**	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.220.000	0	0	0	32.220.000	40.346.000	0	0	0	40.346.000	8.126.000	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.714.342.068**	**0**	**0**	**0**	**1.714.342.068**	**2.117.432.500**	**0**	**0**	**0**	**2.117.432.500**	**403.090.432**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.699.852.068	0	0	0	1.699.852.068	2.090.490.000	0	0	0	2.090.490.000	390.637.932	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.120.000	0	0	0	1.120.000	5.172.500	0	0	0	5.172.500	4.052.500	
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.370.000	0	0	0	13.370.000	21.770.000	0	0	0	21.770.000	8.400.000	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**43.850.000**	**0**	**0**	**0**	**43.850.000**	**69.908.000**	**0**	**0**	**0**	**69.908.000**	**26.058.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.750.000	0	0	0	3.750.000	8.818.000	0	0	0	8.818.000	5.068.000	
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.100.000	0	0	0	40.100.000	61.090.000	0	0	0	61.090.000	20.990.000	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**164.768.210**	**0**	**0**	**0**	**164.768.210**	**205.368.210**	**0**	**0**	**0**	**205.368.210**	**40.600.000**	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60.180.080	0	0	0	60.180.080	60.180.080	0	0	0	60.180.080	0	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.178.130	0	0	0	10.178.130	10.178.130	0	0	0	10.178.130	0	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88.410.000	0	0	0	88.410.000	129.010.000	0	0	0	129.010.000	40.600.000	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**325.000**	**146.411.120**	**0**	**0**	**146.736.120**	**0**	**155.540.440**	**0**	**0**	**155.540.440**	**8.804.320**	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		325.000	146.411.120	0	0	146.736.120	0	155.540.440	0	0	155.540.440	8.804.320	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**110.205.500**	**0**	**0**	**0**	**110.205.500**	**110.205.500**	**0**	**0**	**0**	**110.205.500**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		73.200.000	0	0	0	73.200.000	73.200.000	0	0	0	73.200.000	0	
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.505.500	0	0	0	35.505.500	35.505.500	0	0	0	35.505.500	0	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**484.336.950**	**1.200.000**	**0**	**0**	**485.536.950**	**500.491.250**	**1.200.000**	**0**	**0**	**501.691.250**	**16.154.300**	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132.639.300	0	0	0	132.639.300	148.793.600	0	0	0	148.793.600	16.154.300	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23.900.000	0	0	0	23.900.000	23.900.000	0	0	0	23.900.000	0	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		327.797.650	1.200.000	0	0	328.997.650	327.797.650	1.200.000	0	0	328.997.650	0	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**150.862.460**	**0**	**0**	**0**	**150.862.460**	**1.025.554.140**	**0**	**0**	**0**	**1.025.554.140**	**874.691.680**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**150.862.460**	**0**	**0**	**0**	**150.862.460**	**1.025.554.140**	**0**	**0**	**0**	**1.025.554.140**	**874.691.680**	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147.522.460	0	0	0	147.522.460	1.022.214.140	0	0	0	1.022.214.140	874.691.680	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.340.000	0	0	0	3.340.000	3.340.000	0	0	0	3.340.000	0	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				**5.440.711.278**	**0**	**0**	**0**	**5.440.711.278**	**30.345.416.862**	**0**	**0**	**0**	**30.345.416.862**	**24.904.705.584**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**5.440.711.278**	**0**	**0**	**0**	**5.440.711.278**	**30.345.416.862**	**0**	**0**	**0**	**30.345.416.862**	**24.904.705.584**	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		224.676.278	0	0	0	224.676.278	120.682.218	0	0	0	120.682.218	(103.994.060)	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.213.715.000	0	0	0	5.213.715.000	30.222.414.644	0	0	0	30.222.414.644	25.008.699.644	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.320.000	0	0	0	2.320.000	2.320.000	0	0	0	2.320.000	0	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**713.217.800**	**0**	**0**	**0**	**713.217.800**	**1.182.600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.182.600.000**	**469.382.200**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**713.217.800**	**0**	**0**	**0**	**713.217.800**	**1.182.600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.182.600.000**	**469.382.200**	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		710.317.800	0	0	0	710.317.800	1.179.700.000	0	0	0	1.179.700.000	469.382.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.900.000	0	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**55.899.960**	**0**	**0**	**0**	**55.899.960**	**155.899.960**	**0**	**0**	**0**	**155.899.960**	**100.000.000**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**55.899.960**	**0**	**0**	**0**	**55.899.960**	**155.899.960**	**0**	**0**	**0**	**155.899.960**	**100.000.000**	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.999.960	0	0	0	54.999.960	154.999.960	0	0	0	154.999.960	100.000.000	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		900.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**7.912.330.200**	**0**	**0**	**0**	**7.912.330.200**	**8.087.530.200**	**0**	**0**	**0**	**8.087.530.200**	**175.200.000**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**7.912.330.200**	**0**	**0**	**0**	**7.912.330.200**	**8.087.530.200**	**0**	**0**	**0**	**8.087.530.200**	**175.200.000**	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		377.135.200	0	0	0	377.135.200	377.135.200	0	0	0	377.135.200	0	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		900.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.534.295.000	0	0	0	7.534.295.000	7.709.495.000	0	0	0	7.709.495.000	175.200.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.828.710.683
Februari	Rp941.669.169
Maret	Rp354.290.515
April	Rp6.748.327.556
Mei	Rp560.249.806
Juni	Rp447.105.186
Juli	Rp2.739.670.900
Agustus	Rp320.322.810
September	Rp381.366.922
Oktober	Rp766.191.740
November	Rp26.520.369.924
Desember	Rp389.217.851
Jumlah	Rp43.997.493.062

Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

IMAM ASHARI, S.Sos

NIP: 196706141989021002

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

1. Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 pukul 13.30 s.d 15.20 WIB bertempat di Balai Desa Karangsono Kec. Loceret Kab. Nganjuk telah dilaksanakan pertemuan pertemuan pihak warga dengan pihak tambang galian C tentang keluhan warga terkait adanya banyak jalan yg rusak di Desa karangsono yang diikuti sekitar 30 orang dengan penanggungjawab kegiatan Sdr. Maryono (Kades Karangsono).





2. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 10.45 s.d 12.30 WIB bertempat di Balai Ds. Babadan Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk telah dilaksanakan kegiatan musyawarah bersama Forpimcam Patianrowo terkait adanya polusi udara dari pakan ternak lele milik Sdr. Sutikno (Pengusaha lele di Ds. Babadan) untuk mencari solusi agar usaha tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitar, yang dihadiri 20 orang dengan dipimpin oleh Toni Soesanto, S.STP. M.Si. (Plt Camat Patianrowo).





3. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.10 s.d. 12.00 WIB, bertempat di PT. Gunawan Fajar Jl. Raya DPU Ds. Jegrek Kec. Lengkong Kab. Nganjuk telah dilaksanakan kegiatan musyawarah secara Bipartite I antara anggota SBTP-FSBI PT. Gunawan Fajar dengan pihak Management PT. Gunawan Fajar terkait tuntutan pekerja PT. Gunawan Fajar yang diikuti 8 orang pimpinan Sdr. Joko Wahyudi (Ketua SBTP-FSBI PT. Gunawan Fajar).





4. Pada Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.15 s.d 16.15 WIB, bertempat di ruang rapat Setda Kab. Nganjuk Jl. Basuki Rahmat No 1 Kel. Mangundikaran Kec/Kab. Nganjuk telah dilaksanakan rapat koordinasi perihal pengaduan masyarakat Ds. Jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk terkait dengan pabrik bulu ayam yang diolah menjadi bahan baku poor pakan ternak milik CV Maharani Mapan Abadi yang meresahkan masyarakat Ds. Jaan Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang diikuti oleh 30 orang dipimpin oleh Sdr. Samsul Huda SH.MH (Asisten perintahan dan Kesra Kab. Nganjuk).





5. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 09.00 s.d 18.15 WIB bertempat di depan pabrik pengolahan bulu ayam menjadi tepung (bahan campuran pembuatan pur pakan ternak) milik CV. Maharani Mapan Abadi di Ds. Ja'an Kec. Gondang Kab. Nganjuk telah dilaksanakan Kegiatan Trial Produksi pabrik CV. Maharani Mapan Abadi yang mengolah bulu ayam menjadi tepung (bahan campuran pembuatan pur pakan ternak) yang menimbulkan bau sehingga memicu aksi unjuk rasa spontanitas oleh masyarakat Ds. Ja'an Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang diikuti sekitar 200 orang, dengan Korlap Sdr. Kapriyanto (Warga Desa Ja'an Kec. Gondang Kab. Nganjuk).





6. Pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 pukul 11.40 s.d 13.15 WIB, bertempat di Balai Desa Ja'an Jl. Raya Gondang-Lengkong Kec. Gondang Kab. Nganjuk telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah (Mediasi) Terkait Proses Penjaringan Tenaga Kerja di PT. Mitra Mulia Makmur dengan Masyarakat Desa Ja'an Kec. Gondang Kab. Nganjuk dan sekitarnya, yang diikuti sekitar 70 orang, dengan penanggung jawab kegiatan Sdr. Adi Arianto (Kepala Desa Ja'an Kec. Gondang Kab. Nganjuk).





Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
Periode Pelaksanaan Januari s/d Desember Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
Persentase Penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sanpai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggunjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Umum																						
		Bidang Urusan Kesatuan Bangsa			19.562.644.897	65%	12.798.243.571	90%	43.997.493.062		499.455.181		6.693.468.419		4.216.318.650		31.838.847.826		43.248.090.076		56.046.333.647		286,50%	Bakesbangpol
	Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi perkantoran	95%	7.899.190.189	86%	4.327.900.183	95%	3.200.491.900	90,06%	497.055.181	91%	761.508.619	89%	698.263.800	89%	899.133.132	90%	2.855.960.732	88%	7.183.860.915	93%	90,94%	Bakesbangpol
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun	4 lap	79.515.625	4 lap	42.368.750	4 lap	40.346.000	1	2.375.000	1	2.375.000	1	14.452.000	1	20.901.000	4	40.103.000	8	82.471.750	200%	103,72%	Bakesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	79.515.625	4 lap	42.368.750	4 lap	40.346.000	1	2.375.000	1	2.375.000	1	14.452.000	1	20.901.000	4	40.103.000	8	82.471.750	200%	103,72%	Bakesbangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3	6.031.736.224	25 dok	3.300.682.582	28 dok	2.117.432.500	7	187.427.095	8	627.467.897	6	504.417.215	6	584.579.966	27	1.903.892.173	52	5.204.574.755	1733%	86,29%	Bakesbangpol
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bl	6.002.524.436	12 lap	3.284.507.332	15 org/bln	2.090.490.000	3	186.337.095	5	625.561.897	3	500.057.215	3	568.928.966	14	1.880.885.173	26	5.165.392.505	173%	86,05%	Bakesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	3.561.788	1 lap	1.485.250	1 lap	5.172.500	1	-	-	816.000	-	-	-	3.852.000	1	4.668.000	2	6.153.250	200%	172,76%	Bakesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	16 lap	25.650.000	12 lap	14.690.000	12 lap	21.770.000	3	1.090.000	3	1.090.000	3	4.360.000	3	11.799.000	12	18.339.000	24	33.029.000	150%	128,77%	Bakesbangpol
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	2 dok	52.657.500	1 pkt	5.820.000	3 pkt	69.908.000	20%	10.680.000	20%	7.744.070	-	-	60%	45.000.500	100%	63.424.570	1	69.244.570	50%	131,50%	Bakesbangpol
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 pkt	22.657.500	1 pkt	5.820.000	2 pkt	8.818.000	0	-	-	-	-	-	2	8.660.500	2	8.660.500	2	14.480.500	200%	63,91%	Bakesbangpol

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 org	30.000.000	0	-	30 org	61.090.000	6	10.680.000	6	7.744.070	-	-	18	36.340.000	30	54.764.070	30	54.764.070	150%	182,55%	Bakesbangpol
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dok	521.830.388	8 dok	268.943.960	4 sub	205.368.210	1	26.857.966	1	19.391.000	1	66.766.950	1	71.169.904	4	184.185.820	12	453.129.780	300%	86,83%	Bakesbangpol
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 pkt	161.441.723	10 pkt	82.228.200	5 pkt	60.180.080	1	6.779.500	1	6.780.500	2	17.358.750	1	20.050.250	5	50.969.000	15	133.197.200	300%	82,50%	Bakesbangpol
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 pkt	36.590.165	6 pkt	19.533.470	3 pkt	10.178.130	1	496.750	-	1.058.000	1	3.372.000	1	3.626.350	3	8.553.100	9	28.086.570	300%	76,76%	Bakesbangpol
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dok	21.375.000	10 dok	11.700.000	5 pkt	6.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.500.000	4	6.000.000	14	17.700.000	280%	82,81%	Bakesbangpol
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 lap	302.423.500	52 lap	155.482.290	36 lap	129.010.000	12	18.581.716	6	10.552.500	6	44.536.200	13	44.993.304	37	118.663.720	89	274.146.010	247%	90,65%	Bakesbangpol
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	1 dok	152.062.067	7 unit	108.058.336	10 unit	155.540.440	8	130.924.000	-	-	-	-	2	21.886.500	10	152.810.500	17	260.868.836	1700%	171,55%	Bakesbangpol
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	152.062.067	7 unit	108.058.336	10 unit	155.540.440	8	130.924.000	-	-	-	-	2	21.886.500	10	152.810.500	17	260.868.836	425%	171,55%	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	3 dok	325.079.413	8 dok	164.086.915	4 dok	110.205.500	1	14.993.624	1	16.939.810	-	18.280.200	1	27.045.169	3	77.258.803	11	241.345.718	367%	74,24%	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	3.897.500	2 lap	1.996.000	1 lap	1.500.000	0	400.000	-	420.000	1	-	-	-	1	820.000	3	2.816.000	300%	72,25%	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 lap	175.162.500	6 lap	80.516.815	3 lap	73.200.000	1	13.612.124	-	14.075.810	1	13.414.700	1	16.058.169	3	57.160.803	9	137.677.618	300%	78,60%	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 lap	146.019.413	4 lap	81.574.100	2 lap	35.505.500	0	981.500	1	2.444.000	-	4.865.500	1	10.987.000	2	19.278.000	6	100.852.100	300%	69,07%	Bakesbangpol
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	3 jns	736.308.972	6 jns	437.939.640	3 jns	501.691.250	1	123.797.496	1	87.590.842	-	94.347.435	1	128.550.093	3	434.285.866	9	872.225.506	300%	118,46%	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	231.066.575	16 unit	131.796.405	8 unit	148.793.600	2	22.446.224	2	24.987.642	2	38.113.335	2	52.140.367	8	137.687.568	24	269.483.973	300%	116,63%	Bakesbangpol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	41.187.500	40 unit	25.250.000	20 unit	23.900.000	3	1.100.000	3	850.000	3	2.985.000	10	14.510.000	19	19.445.000	59	44.695.000	295%	108,52%	Bakesbangpol
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	464.054.897	2 unit	280.893.235	1 unit	328.997.650	1	100.251.272	-	61.753.200	-	53.249.100	-	61.899.726	1	277.153.298	3	558.046.533	300%	120,25%	Bakesbangpol
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	90%	683.925.197	85%	137.625.600	85%	1.025.554.140	3%	-	68%	31.528.000	6%	61.044.250	68%	808.982.700	91,2%	901.554.950	88%	1.039.180.550	98%	151,94%	Bakesbangpol

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Monev	300 org	683.925.197	608 org	137.625.600	2706 org	1.025.554.140	75	-	406	31.528.000	156	61.044.250	1.831	808.982.700	2468	901.554.950	3076	1.039.180.550	1025%	151,94%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 org	671.955.197	608 org	134.800.600	2.706 org	1.022.214.140	75	-	406	31.528.000	156	59.544.250	1.831	808.982.700	2.468	900.054.950	3076	1.034.855.550	1025%	154,01%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 lap	11.970.000	22 lap/kali	2.825.000	3 lap	3.340.000	-	-	1	-	1	1.500.000	1	-	3	1.500.000	25	4.325.000	833%	36,13%	Bakesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	90%	5.660.951.113	85%	4.566.308.000	90%	30.345.416.862	-	-	100%	2.976.457.900	0%	85.368.650	0%	27.259.837.994	100%	30.321.664.544	93%	34.887.972.544	103%	616,29%	Bakesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai poltik yang menjadi peserta pemantapan pendidikan dan etika politik, penerima hibah dan yang dimonev	10 parpol	5.660.951.113	20	4.566.308.000	10	30.345.416.862	-	-	10	2.976.457.900	-	85.368.650	-	27.259.837.994	10	30.321.664.544	30	34.887.972.544	300%	616,29%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 org	377.095.644	296 org	117.825.500	206 org	120.682.218	-	-	14	12.002.900	194	83.568.650	-	1.878.350	208	97.449.900	504	215.275.400	202%	57,09%	Bakesbangpol

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 parpol	5.280.435.469	20 parpol	4.446.682.500	10 parpol	30.222.414.644	-	-	10	2.964.455.000	-	-	6	27.257.959.644	16	30.222.414.644	36	34.669.097.144	360%	656,56%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 lap	3.420.000	4 lap	1.800.000	3 lap	2.320.000	-	-	1	-	1	1.800.000	1	-	3	1.800.000	7	3.600.000	233%	105,26%	Bakesbangpol
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang menerima Hibah dan yang dimonev	90%	2.412.288.538	34%	1.125.027.500	90%	1.182.600.000	-	1.275.000	42%	626.275.000	0%	16.875.000	50%	443.350.000	92%	1.087.775.000	63%	2.212.802.500	70%	91,73%	Bakesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang menerima bantuan hibah dan yang dimonev	6 ormas	2.412.288.538	8 ormas	1.125.027.500	12 ormas	1.182.600.000	-	1.275.000	5	626.275.000	-	16.875.000	6	443.350.000	11	1.087.775.000	19	2.212.802.500	317%	91,73%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 ormas	2.408.868.538	8 ormas	1.123.227.500	12 ormas	1.179.700.000	-	1.275.000	5	626.275.000	-	16.875.000	6	442.375.000	11	1.086.800.000	19	2.210.027.500	317%	91,75%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 lap	3.420.000	6 lap	1.800.000	3 lap	2.900.000	-	-	1	-	1	-	1	975.000	3	975.000	9	2.775.000	300%	81,14%	Bakesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	90%	199.357.460	99%	184.914.800	90%	155.899.960	-	-	100%	-	28%	23.346.000	62%	61.393.750	190%	84.739.750	144%	269.654.550	160%	135,26%	Bakesbangpol

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan dimonev	100 org	199.357.460	965	184.914.800	450 org	155.899.960	-	-	1	-	128	23.346.000	277	61.393.750	406	84.739.750	1371	269.654.550	1371%	135,26%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 org	195.937.460	965 bln	184.014.800	450 org	154.999.960	-	-	-	-	128	23.346.000	277	61.393.750	405	84.739.750	1370	268.754.550	1370%	137,16%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 lap	3.420.000	6 lap	900.000	3 lap	900.000			1	-	1	-	1	-	3	-	9	900.000	300%	26,32%	Bakesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	2.706.932.400	100%	2.456.467.488	90%	8.087.530.200	25%	1.125.000	25%	2.297.698.900	25%	3.331.420.950	25%	2.366.150.250	100%	7.996.395.100	100%	10.452.862.588	111%	386,15%	Bakesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang dibahas dan dimonev	90%	2.706.932.400	100%	2.456.467.488	90%	8.087.530.200	25%	1.125.000	25%	2.297.698.900	25%	3.331.420.950	25%	2.366.150.250	100%	7.996.395.100	100%	10.452.862.588	111%	386,15%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150	2.003.512.400	24 lap	2.455.567.488	12 lap	377.135.200	3	1.125.000	3	95.625.000	3	134.674.500	3	79.362.600	12	310.787.100	36	2.766.354.588	24%	138,08%	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 lap	3.420.000	24 lap	900.000	12 lap	900.000	3	-	3	-	3	225.000	3	-	12	225.000	36	1.125.000	1200%	32,89%	Bakesbangpol

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 lap	700.000.000	0	-	12 dok	7.709.495.000	3	-	3	2.202.073.900	3	3.196.521.450	3	2.286.787.650	12	7.685.383.000	12	7.685.383.000	100%	1097,91%	
Catatan : *)																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya :																								

*) Disi oleh Kepala Bappeda

Disusun
Nganjuk, 10 Januari 2024
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

Dievaluasi
Nganjuk, 10 Januari 2024
KEPALA BADAN
PERENCANANAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199003 1 012